

TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2024
KABUPATEN PURWAKARTA

Pemerintah Daerah	Komponen Penilaian	Temuan Kondisi		Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
	Perencanaan Kinerja	Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya : - Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan - Dinas Pangan dan Pertanian - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Lingkungan Hidup	1	Memastikan seluruh Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja pada tahun berjalan dan telah diformalkan. Selanjutnya, memastikan seluruh Perjanjian Kinerja disampaikan melalui esr.menpan.go.id	- Membuat surat untuk PD perihal penyusunan Perjanjian Kinerja dengan batas waktu mengacu pada Renstra OPD dan RPD (yang sudah diverifikasi dan ditandatangani). - Membuat surat ke PD perihal informasi LHE MenpanRB	100% (47 OPD) Upload dokumen PK di esr.menpan.go.id dan esakip.purwakartakab.go.id	February 2025	BAPPERIDA, Bagian Organisasi Setda Purwakarta	sudah dilaksanakan	https://1drv.ms/b/s!AoE0qOvcy2X3ircIcJn0eUSOX_AIRA
		Terdapat dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 yang belum di formalkan diantaranya : - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
		Terdapat Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur (<i>measurable</i>), relevan dan cukup untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan. Seperti pada Dinas Sosial dengan sasaran strategis "Meningkatkan penanganan PPKS, memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat, meningkatnya koordinasi pelaksanaan atensi penyandang <i>disabilitas</i> " Penetapan rencana aksi pada sebagian besar Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Contohnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	2	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun Perangkat daerah dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (<i>result oriented</i>) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound</i>) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi;	Sudah disesuaikan pada penyusunan RPD Tahun 2024-2026	100%	January 2025	Bapperida	sudah dilaksanakan	https://1drv.ms/b/s!AoE0qOvcy2X3hd9TOxezC0Ki-eru2w?e=f8xSes
		Sebagian Perangkat Daerah belum menyampaikan rencana aksi tahun 2024 pada laman esr.menpan.go.id. Contohnya pada Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup.		Memastikan seluruh Perangkat Daerah menyusun Rencana Aksi yang didukung aksi aksi selaras dalam mencapai kinerja dan mengunggah pada laman esr.menpan.go.id	- Membuat surat ke PD perihal informasi LHE MenpanRB	100%	February 2025	Bagian Organisasi Setda Purwakarta	sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/15jouauMkysi15mNFL5c7Tm4Ew2sfAldj/view?usp=drive_link
		Penjenjangan/cascading kinerja Perangkat Daerah belum mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan CSF atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat. Contohnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Lingkungan Hidup.	4	Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>Critical Succes Factor</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara	- Melaksanakan reviu/verivalid penjenjangan kinerja	100%	February 2025	BAPPERIDA	sudah dilaksanakan	https://1drv.ms/f/s!AoE0qOvcy2X3isiPvYIC3MpHrK6CjA?e=sRpmPb
Kabupaten Purwakarta	Pengukuran	Beberapa dokumen IKU Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut. Contohnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian.	5	Menyempurnakan IKU dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja	Dalam Kertas Kerja RPD Tahun 2024-2026 sudah memuat definisi operasional dan formulasi penghitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja	100%	January 2025	Bapperida	sudah dilaksanakan	https://1drv.ms/f/s!AoE0qOvcy2X3irYLcPv4vhzeWqOtQ7e-AVmkxs

kinerja	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada Perangkat Daerah masih berorientasi pada penyerapan anggaran sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya.	6	Mendorong PD melakukan monitoring tidak hanya dari ketercapaian anggaran saja, melainkan juga tingkat ketercapaian kinerja;	Sudah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja baik anggaran maupun ketercapaian kinerja Per Triwulan	100%	January 2025	Bapperida	sudah dilaksanakan	https://1drv.ms/f/s!AoE0gOvcy2X3irYlcPvf4yhzeWqOtQ?e=AVmkxs
	Aplikasi e-skip belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara berkala.	7	Memanfaatkan aplikasi e-skip sebagai alat bantu dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;	aplikasi e-skip sebagai alat bantu dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;	100%	January 2025	Bapperida, Inspektorat Daerah Kabupaten	sudah dilaksanakan	https://eskip.purwakartakab.go.id/home/capaian
Pelaporan Kinerja	LPPD dan laporan kinerja Perangkat Daerah belum seluruhnya dipublikasikan melalui laman resmi <i>website</i> Pemda untuk diakses oleh masyarakat.	8	Menginformasikan laporan kinerja baik dari level Pemda maupun Perangkat Daerah dalam <i>website</i> laman resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik	- Mempublikasikan Laporan Kinerja Pemda - Membuat surat edaran ke perangkat daerah agar mempublikasikan Laporan Kinerja	100%	February 2025	Bagian Organisasi Setda Purwakarta	sudah dilaksanakan	https://ppid.purwakartakab.go.id/public/detail/M3dxtCs3WE12eXjibVBGQjIZTJRkUT09
	Laporan kinerja Perangkat Daerah belum menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan yang memadai dalam mencapai kinerja. Contohnya pada Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas Pemberdayaan.	9	Meningkatkan kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan	- Melaksanakan Bimtek penyusunan LKjIP - Mengasistensi draft LKjIP Perangkat Daerah	100%	Januari - November 2025	Bagian Organisasi Setda Purwakarta	<i>Sedang dilaksanakan</i>	https://drive.google.com/drive/folders/1g1xrG8oH65auif6WQXu_J8AdWMLsCwjG?usp=drive_link
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Evaluasi AKIP internal terhadap Perangkat Daerah tahun 2024 belum dilaksanakan.	10	Memastikan evaluasi internal pada tahun berjalan telah di laksanakan sehingga kualitas evaluasi internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intren Pemerintah dapat di lakukan diukur kualitasnya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi	- Surat Pernyataan bahwa Laporan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 adalah benar-benar hasil Evaluasi atas SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. - Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.	100%	February 2025	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1AYBQR7XB8Ga8flqwDJG9G9SifkXSWeP1
	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum memicu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.	11	Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada PD dan menyampaikan kepada pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;	dilaksanakannya desk tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	100%	February 2025	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1w-4L5tTuSxuf5YYwmOTNBpayOHDoSv0p?usp=sharing
	Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan <i>reward and punishment</i> kepada Perangkat Daerah.	12	Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.	akan melaksanakan penyusunan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Nilai beserta Pemberian Reward and Punishment pada Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (April 2025)	100%	April 2025	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	Akan dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1CSEPI8bil5he6fpgFs2-Y_ZEtRDTPy2?usp=sharing
	<i>Monitoring</i> atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja								

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA